

Baru Dilantik, 2 Kades Diminta Berinovasi Membangun Desa

TANGERANG (IM) - Dua Kepala Desa (Kades) yang baru saja dilantik diharapkan mampu membangun desa secara optimal. Harapan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dadan Gandana usai pelantikan dua Kepala Desa hasil Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW).

Keduanya adalah Kepala Desa Lengkon Kulon, Kecamatan Pagedangan, Muhamad Sohob dan Kepala Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Mohamad Yopi Koslaniyudin. Mereka berdua terpilih pada 19 Desember lalu.

Dadan Gandana, mengatakan, pemilihan Kepala Desa tersebut untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala desa yang tidak bisa lagi menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

"Harapannya kepala desa yang dilantik dapat melaksanakan tugas sesuai dengan arahan yang berlaku, berinovasi dan juga melayani masyarakat serta membangun desa dengan lebih optimal lagi," katanya, Kamis (30/12).

Kepala Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Mohamad Yopi Koslaniyudin, berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh Almarhum ayahnya.

"Terima kasih kepada masyarakat Desa Parahu yang memberikan saya kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala desa menggantikan orang tua saya. Nantinya saya juga akan meneruskan program-program sebelumnya yang diwariskan oleh orang tua saya," pungkasnya. ● pp



SITUS CAGAR BUDAYA DI BANTEN TERENDAM BANJIR

Sejumlah anak bermain di area cagar budaya Keraton Kaibon yang terendam banjir di Kasemen, Serang, Banten, Kamis (30/12). Sejumlah tokoh dan budayawan mendesak Pemda setempat untuk segera mengatasi genangan air yang kerap terjadi setelah hujan lebat sebab dikhawatirkan akan merusak struktur peninggalan budaya tersebut.

BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp5 M di Proyek Sport Center-RSUD Banten

Kepada Pemprov Banten, Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Novie Irawati meminta permasalahan tersebut agar segera diselesaikan dan dikembalikan ke kas daerah. Paling lambat adalah 60 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SERANG (IM) - Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Banten, menemukan adanya kelebihan pembayaran di proyek pembangunan Sport Center dan RSUD Banten

delapan lantai di Jalan Syech Nawawi Al Bantani. Total temuan ini mencapai Rp 5 miliar lebih.

Pemeriksaan kepatuhan oleh BPK dilakukan pada be-

Ini Sanksinya Jika Gelar Perayaan Tahun Baru di Tangerang

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Tangerang mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perayaan pergantian tahun 2021-2022 dan akan memberikan sanksi gelar perayaan tahun baru. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati (Inbup) Nomor 18 Tahun 2021.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Fahrur Rofi' mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait akan terus melakukan pengawasan hingga tanggal 2 Januari 2022. "Posko-posko pengawasan masih ada sampai tanggal 2 Januari 2022. Kita juga akan keluarkan surat edaran terkait pelanggaran perayaan pergantian tahun," katanya Kamis (30/12).

Dikatakannya, akan ada sanksi administrasi bagi masyarakat yang melanggar dan tetap mengadakan

pesta pergantian tahun. "Ada sanksi administrasi. Memang tidak ada di Inbup, tapi ada sanksinya," ungkapnya.

Untuk itu, Fahrur meminta agar satgas tingkat RT dan RW yang sudah dibentuk untuk benar-benar mengawasi warga agar tidak melakukan perayaan di malam tahun baru. "Kita pantau melalui satgas RT dan RW agar dapat mengawasi warga di malam tahun baru."

Untuk itu, Fahrur mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah saja saat malam pergantian tahun.

"Kami harap masyarakat mengerti dengan keadaan saat ini di tengah pandemi Covid-19. Saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang mengikuti peraturan yang ada," pungkasnya. ● pp

PASTIKAN PERAYAAN TAHUN BARU 2022 KONDUSIF

Polda Banten Mulai Sebar Pasukan

SERANG (IM) - Mendekati libur Tahun Baru, personel Polda Banten dan jajaran menggelar apel pengamanan destinasi wisata pantai Anjer menjelang perayaan Tahun Baru 2022, di Mercusuar Cikoneng, Kecamatan Anjer, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (30/12).

Objek pengamanan sepanjang Pantai Anjer di Kabupaten Serang hingga Pantai Carita di Kabupaten Pandeglang merupakan daerah wisata yang selalu dipadati wisatawan pada musim liburan, terlebih libur pergantian tahun.

Apel pengamanan ini dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Rudy Purnomo dihadiri Dirsamapta Polda Banten, Wadir Lantas Polda Banten, Kapolres Cilegon, dan Kabag Binops Roops Polda Banten.

"Apel pengamanan dalam rangka Operasi Lilin Maung ini sebagai bentuk pelayanan sekaligus pengamanan pada momentum libur tahun baru. Kami berharap pengelola tempat wisata serta wisatawan dapat mengikuti aturan pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19," ujar Rudy Purnomo.

Kombes Pol Rudy Purnomo mengatakan bahwa sebanyak 200 personel yang tergabung dalam Operasi Lilin Maung 2021 mengikuti apel pengamanan perayaan Tahun Baru.

"Sebanyak 200 personel

kami siagakan di sejumlah titik untuk memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat menjelang libur Tahun Baru 2022, tentunya di momentum ini akan adanya mobilitas masyarakat ke tempat wisata Anjer maupun Carita," kata Rudy Purnomo.

Rudy Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan menjelang Tahun Baru 2022 memiliki 4 sasaran yang wajib kita amankan yakni orang, barang, tempat dan kegiatan.

"Kita fokuskan pengamanan pada objek wisata yang ada di pantai Anjer dan Carita baik perhotelan, cottage, dan tempat perbelanjaan, agar optimal dalam memberikan pelayanan pengamanan terhadap masyarakat sehingga aktifitas masyarakat tidak ada gangguan dan terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," jelas Rudy Purnomo.

Sementara Kabid Humas, AKBP Shinto Silitonga mengimbau kepada masyarakat dalam libur tahun baru 2022 agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Kita akan lakukan rutin patroli ke tempat wisata dan perhotelan guna memastikan penerapan dan fasilitas proses oleh pengelola tempat wisata. Kami mengimbau kepada masyarakat agar disiplin menerapkan proses guna mencegah terjadinya cluster Covid-19 baru," tandasnya. ● pra

lanja modal infrastruktur dan belanja pemeliharaan jalan tahun anggaran 2021 hingga bulan November. Temuan secara umum adalah adanya harga perkiraan sementara (HPS) yang ditetapkan oleh PPK tidak ekonomis-akuntabel, proses pemilihan penyedia oleh PPK yang mengakibatkan kesempatan penyedia yang lolos kualifikasi hilang.

Temuan-temuan itu kemudian mengakibatkan kelebihan pembayaran di pembangunan Sport Center dan RSUD Banten. Juga mengakibatkan ada ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pembangunan.

"Kelebihan pembayaran antara lain adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi," kata Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Novie Irawati di Pal Lima, Serang, Kamis (30/12).

Kepada Pemprov Banten,

Novie meminta permasalahan tersebut agar segera diselesaikan dan dikembalikan ke kas daerah. Paling lambat adalah 60 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain soal kepatuhan, BPK juga menyampaikan soal pemeriksaan kinerja Pemprov Banten. Bahwa, pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masih ditemukan adanya pencatatan distribusi vaksin yang belum real time. Juga ada kegiatan penjarangan sasaran belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

"Pemprov Banten perlu menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah tersebut untuk meningkatkan efektivitas vaksinasi," paparinya.

Terakhir, atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja juga oleh BPK dinilai belum memadai. SMK perlu

difasilitasi untuk memperoleh kerjasama dengan dunia kerja.

"Apabila tidak diatasi, akan dapat menghambat efektivitas dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan industri dalam rangka peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing," pungkasnya.

Untuk temuan kepatuhan, total temuan BPK sendiri mencapai Rp 5 miliar baik dalam belanja pemeliharaan jalan, pembangunan Sport Center dan RSUD Banten. Rp 1,5 miliar sudah ditindaklanjuti dan diserahkan ke kas daerah.

"Keseluruhan Rp 5 miliar, yang sudah Rp 1,5 miliar, kita bereskan, karena ada waktu 60 hari ke depan, sesegera mungkin Sekda, Inspektorat segera kembalikan ke kas daerah," kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi. ● pra

Alat Kelamin Disemprot Pewangi, Istri di Tangerang Jadi Korban KDRT

TANGERANG (IM) - Seorang ibu rumah tangga di Tangerang, yakni M (22), mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan, ia sudah menerima perlakuan tidak menyenangkan dari suaminya AL (23) sejak masih berpacaran dahulu.

Tak tahan dengan perlakuan sang suami, M membongkar segala keresahan dan apa yang dialaminya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, M bercerita sering mengalami KDRT AL. Bahkan, M mengakui hal ini sudah menpanya sejak dirinya masih berpacaran dengan AL pada awal 2019.

Salah satu peristiwa tragis yang dialami M yakni alat kelaminnya disemprot oleh pewangi pakaian. Hal itu karena AL menaruh rasa curiga kepada M. Keduanya saat itu masih berpacaran. "Dia lakukan itu karena dia curiga sama saya. Dia kira saya masih berhubungan sama mantan apalah segala macam," ujarnya saat dihubungi.

Lantas dari hal itu membuat AL gelap mata dengan langsung menyemprotkan pewangi baju (kispay) ke alat kelamin M sebanyak tiga kali. Setelah kejadian itu, M langsung alami

kesulitan untuk buang air kecil, dan sudah memeriksa hal ini ke RS Fatmawati Jakarta.

"Saya lagi gosok, ada gosokan dan Kispay, diambil semprotan 3 kali ke mulut 3 kali ke vagina. Semprot vagina itu 31 Maret 2019 ya. Itu saya gak bisa buang air kecil, bener-bener enggak bisa," tuturnya.

Tak hanya itu, M mengaku AL juga menyemprotkan pewangi pakaian itu ke mulutnya sebanyak tiga kali. Ternyata hal ini tidak sekali dua kali M rasakan. Dia sudah sering mendapatkan kekerasan lainnya. Bahkan di saat ketika dia mengandung anak pertama dan keduanya.

Diketahui, M menikah dengan AL pada 27 September 2019. Namun, dia sudah mendapat perlakuan kekerasan sejak awal 2019.

"Dia kasar, awal pacaran 2019 saya sering ditonjok dan ditampar," ucapnya. Hingga akhirnya, M mulai merasa lelah di mana dia mendapati sang suami berselingkuh. M menjelaskan, setelah mengumpulkan bukti, dia mengetahui sang suami berselingkuh dengan tetangganya sendiri.

Hal ini dialaminya ketika tengah mengandung anak ked-

uanya di usia kandungan 3 bulan.

"Dia selingkuh, ternyata dia selingkuh sama tetangganya. Saya hamil 3 bulan saat itu. Dia enggak ngaku tapi di-chat manggil-manggil sayang," ujarnya.

Selanjutnya, cecekok tak terkelakan di antara mereka. AL pun mendorong M hingga terkena perutnya yang sedang mengandung. Alhasil, dari segala perlakuan yang dia terima ini, dia baru bersungguh-sungguh untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian pada 27 Desember 2021.

Sebelumnya, M pernah melaporkan suaminya itu ke Polres Metro Tangerang Kota dengan membuat laporan KDRT yang dia alami pada 12 Desember 2019. Namun, karena pertimbangan satu dan lain hal, dia tak melanjutkan laporannya.

M mengakui, pada Selasa (28/12), dirinya menghadiri pemanggilan pertama oleh pihak kepolisian.

Kasie Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim mengatakan dirinya akan mengecek Laporan tersebut. "Kalau memang benar laporan baru kemarin, nanti saya cek ya," ujarnya saat dihubungi, Selasa (28/12). ● pp



PENAMBAHAN LAYANAN TRANSPORTASI BST

Petugas menyiapkan sepeda untuk diangkut Bus Batik Solo Trans (BST) saat peluncuran BST koridor 5 dan 6 di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/12). Pengoperasian BST koridor 5 dan 6 tersebut untuk meningkatkan pelayanan aglomerasi angkutan transportasi umum kepada masyarakat Solo dan sekitarnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Pemkab Tangerang Perbaiki 1.222 Rumah Tidak Layak Huni Selama 2021

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Pemukiman telah memperbaiki sebanyak 1.222 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2021.

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pemukiman Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah di Tangerang, kemarin mengatakan dari 1.222 unit rumah yang dilakukan rehab tersebut tersebar di 22 wilayah kecamatan.

"Untuk realisasi program 'Gebrak Pakumis' atau rehab RTLH di Kabupaten Tangerang hingga kini sudah mencapai 100 persen dari target sebanyak 1.222 unit rumah, dengan total anggaran per satu unit rumah menghabiskan Rp25 juta," katanya.

Ia mengatakan, setiap tahunnya Pemkab Tangerang menargetkan sebanyak 1.000 unit rumah tidak layak huni untuk diperbaiki. Namun, katanya untuk di tahun 2021 ini melebihi target yang ditentukan.

"Setelunya setiap tahunnya kita hanya menargetkan 1.000 unit rumah, tapi per anggaran saat ini lebih menadi

1.222 unit rumah," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sesuai misi Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dalam program 'Gebrak Pakumis' bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang nihil dari RTLH.

"Insha Allah nanti di tahun 2022 kita akan lanjutkan lagi program 'Gebrak Pakumis' ini," tuturnya.

Adapun salah satu sumber dana perbaikan RTLH ini, kata dia, adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikelola Disperkim setempat.

Ia juga menjelaskan, rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi ini setelah dilakukan ferivikasi ke lapangan dengan cara melihat kondisi rumah secara fisik.

Kemudian, setelah terferivikasi, pemilik rumah akan menerima bantuan berupa bahan-bahan material, tidak berupa uang tunai.

"Ke depan kita rencana akan menyisir di wilayah perkotaan seperti di Kecamatan Kelapa Dua, Pagedangan, Cikupa, Cisauk dan lainnya, karena saat ini dari 22 kecamatan rata-rata berada di wilayah pesisir utara," ujar dia. ● pp



SIDAK PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI

Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kab Indramayu mengambil contoh air pengolahan limbah saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu industri pengolahan ikan di desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (30/12). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melakukan pengambilan contoh air serta pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah tempat pengolahan ikan karena banyak keluhan masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari limbah industri yang berada di sepanjang sungai Prajagumiwang.